

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan globalisasi dunia bisnis dapat memicu para pelaku bisnis dan ekonomi untuk melakukan berbagai tindakan agar bisnisnya tetap bertahan di dunia bisnis. Agar perusahaan tetap bertahan dan semakin berkembang di dalam usahanya, diperlukan upaya perubahan dan penyempurnaan kegiatan perusahaan yang pokoknya adalah peningkatan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pencapaian tujuan perusahaan tersebut.

Dengan meningkatnya perkembangan ekonomi maka semakin bertambah pula perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Dalam perusahaan yang kegiatannya relatif kecil, pimpinan perusahaan masih mampu untuk melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan perusahaan yang dipimpinnya. Pada perusahaan yang volume kegiatannya luas dan besar tidak mungkin lagi pengawasan langsung dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Tetapi tanggung jawab terakhir tetap berada di puncak pimpinan (Dian Rosdiana : 2010).

Semakin meningkatnya operasi dalam perusahaan, manajemen puncak tidak memiliki komunikasi yang cukup dengan berbagai operasi yang ada untuk menilai keefektifan kinerja sehingga menjadi titik kelemahan dalam perusahaan. Untuk memberi keyakinan bahwa apa yang dilaporkan tentang perusahaan adalah benar dan dapat dipercaya, maka pimpinan perusahaan membutuhkan adanya internal auditor sebagai pengawasan di dalam perusahaan yang dapat membuat laporan hasil penelaahan perusahaan. Laporan hasil penelaahan perusahaan tersebut diperoleh

komite audit dari hasil pemeriksaan dan pengawasan akuntan mengenai pengendalian manajemen. Salah satu aplikasi profesi akuntan dalam perusahaan adalah sebagai auditor internal yang melaksanakan kegiatan audit internal.

Audit internal merupakan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam perusahaan yang dilakukan dengan memeriksa akuntansi keuangan dan kegiatan lain. Audit internal juga memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dalam menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen (Hiro Tugiman : 2004).

Audit internal juga menyediakan informasi mengenai kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian manajemen dan kualitas kinerja manajemen. Karena itulah audit internal dituntut mampu memberikan nilai tambah untuk organisasinya dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Keterbatasan komunikasi antara manajemen puncak dan lini operasi yang sedang berjalan tersebut tidak dapat menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya praktik-praktik yang dapat membahayakan perusahaan seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut akan sulit untuk dideteksi, karena akan diketahui apabila adanya kebetulan atau suatu hal yang disengaja. Praktik ini juga merupakan ancaman yang berbahaya bagi perusahaan, karena tindakan tersebut memiliki efek terhadap risiko kerugian keuangan yang berakibat perusahaan itu dapat mengalami kebangkrutan.

Agar dapat tercapainya sistem pengawasan yang baik maka pimpinan perusahaan harus membentuk suatu bidang pengawasan yang dapat bertanggung jawab. Dengan adanya sistem pengawasan segala kebijakan pimpinan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya juga dapat mengamankan harta benda

organisasi dan memperoleh data akuntansi yang tepat dan dapat dipercaya (Firma Sulistyowati dalam Dian Rosdiana: 2010). Faktor yang dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat membahayakan perusahaan, yaitu penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan (Vicky Dzaky : 2013).

*Good Corporate Governance* merupakan suatu pengendalian yang dapat memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan kreditur, sehingga mereka dapat meyakinkan dirinya sendiri akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Dengan demikian *Good Corporate Governance* dapat dijelaskan sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Hessel Nogi S Tangilisan).

Berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002. Pasal 2 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN, dinyatakan bahwa ‘BUMN diwajibkan untuk menerapkan GCG secara konsisten dan menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya’. Sehingga perusahaan-perusahaan dituntut mengambil langkah komprehensif terhadap aset-asetnya agar dapat menghasilkan profit berbentuk pemasukan kas sehingga memiliki nilai tambah (value added). Bank, BUMN, dan perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham, sebagai tulang punggung perekonomian nasional diharapkan menjadi teladan dalam menerapkan corporate governance yang efektif.

Good Corporate Governance merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang

melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, oleh karena itu pentingnya penerapan GCG di Indonesia untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan (KNKG, 2006, dalam Martina Prescila : 2013).

Pelaksanaan GCG ini dalam kenyataan menemui banyak kendala, diantaranya adalah masalah penyimpangan yang banyak terjadi, misalnya adanya penyelewengan penyelewengan terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini tidak akan terjadi apabila kontrol dalam perusahaan tersebut dilaksanakan efektif, dalam hal ini sistem perlu ditegakkan, yaitu perlu penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Suatu perusahaan dengan SPI yang kuat maka setidaknya penyimpangan-penyimpangan dapat diminimumkan. Pihak yang dianggap berperan dalam penegakan SPI ini adalah internal auditor. Internal auditor merupakan suatu profesi akuntan yang bekerja dalam perusahaan dengan tuntutannya adalah dapat memberikan nilai tambah (value added) bagi manajemen perusahaan (Sawyer, 2005: 3).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam rangka menegakkan prinsip GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyajian informasi akuntansi yang berkualitas dan lengkap dalam laporan tahunan sangat diperlukan. Oleh karena itu Satuan Pengawasan Intern sebagai departemen audit internal perusahaan memiliki peranan sangat penting dalam mewujudkan penerapan praktek *Good Corporate Governance*. Dengan begitu, maka penelitian ini mengambil judul “**Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)**”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan *Good Corporate governance* pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) sudah memadai
2. Apakah audit internal berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate governance*

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah penerapan *Good Corporate governance* pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) sudah memadai
2. Mengetahui peran audit internal dalam upaya mewujudkan *Good Corporate Governance*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya:

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis tentang pengaruh peranan audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance*.

- b. Bagi Perusahaan yang Diteliti Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan masukan berupa saran dalam peningkatan kualitas peranan audit internal sejalan dengan penerapan *Good Corporate Governance*.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan panduan dalam penelitian-penelitian di masa yang akan datang.